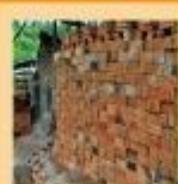


STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH



2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH

<https://aceh.bps.go.id>

2018

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2018

Katalog BPS : 6104006.11
No. Publikasi : 11532.1903
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 52 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Aceh 2018 merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2018 (VIMK18) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dengan metode sampel, dalam publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 - 19 orang, yang meliputi antara lain; banyaknya usaha industri mikro dan kecil, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan usaha, serta pemasaran produksi Industri dan Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun konsumen data. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk berbagai penelitian atau studi khusus yang berkaitan dengan industri mikro dan kecil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah menyelesaikan publikasi ini.

Banda Aceh, Desember 2019
KEPALA BPS PROVINSI ACEH



WAHYUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PENJELASAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan	1
C. Lingkup dan Cakupan.....	2
D. Dokumen yang Digunakan	2
E. Metodologi	3
F. Organisasi Lapangan	4
G. Konsep dan Definisi	4
ULASAN RINGKAS	14
A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja.....	14
B. Balas Jasa Pekerja	16
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja	17
D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran	21
LAMPIRAN TABEL	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2018	14
Tabel 2 Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja menurut Status Pekerja Tahun 2018	15
Tabel 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2018	17
Tabel 4 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2018	20
Tabel 5 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2018	21
Tabel 6 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2018	25
Tabel 7 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2018	28
Tabel 8 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima dari Koperasi Setahun yang Lalu Tahun 2018	29

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2018 16
Gambar 2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2018 18
Gambar 3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2018 19
Gambar 4	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 20
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro Kecil menurut Sumber Modal Tahun 2018 22
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2018 23
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2018 24
Gambar 8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2018 26
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2018 27
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2018 28
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/ Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2018 30
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima pelayanan/Bantuan Tahun 2018 30
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran di Provinsi Aceh Tahun 2018 31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2018	32
Tabel 2 Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2018..	32
Tabel 3 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2018	33
Tabel 4 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2018	33
Tabel 5 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2018	34
Tabel 6 Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2018	34
Tabel 7 Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2018	35
Tabel 8 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2018	35
Tabel 9 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2018	36
Tabel 10 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2018	36
Tabel 11 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2018	37
Tabel 12 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2018	37
Tabel 13 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2018	38
Tabel 14 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2018	38
Tabel 15 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2018	39
Tabel 16 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2018	39

Tabel 17	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2018	40
Tabel 18	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2018	40
Tabel 19	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2018	41
Tabel 20	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2018	41

<https://aceh.bps.go.id>

Penjelasan Umum

<https://aceh.bps.go.id>

A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2018 (VIMK18) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK18 sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK18 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Aceh yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK18 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK17 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi indikator IMK seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Kendala dan pemasaran
- f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK18 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.797 blok sensus dan mencakup 90.529 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Untuk wilayah Aceh terpilih sebanyak 445 blok sensus yang mencakup 3.115 perusahaan/usaha mikro dan kecil untuk seluruh kabupaten/kota. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2018 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. **VIMK18-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK18-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK18-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK18-S2 (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. **VIMK18-RB2 (Rekap Blok Sensus)**, digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a) Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2016 (SE16).
- b) Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran (listing) Survei IMK. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK 2018 sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE2016. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi dilakukan pada level kabupaten/kota.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

Tahap pertama: memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara PPS (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya IMK hasil SE2016 dan stratifikasi implisit menggunakan informasi BS Sentra industri dan Non Sentra Industri. Penarikan sampel blok sensus antar strata di masing-masing kabupaten dilakukan secara *independent*.

Tahap kedua: pemilihan sampel usaha IMK; mengambil seluruh (*take all*) industri kecil dan dipilih sejumlah usaha industri mikro secara sistematis untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK18, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK18 adalah :

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS.
- b. Petugas Pemeriksa (PMS): Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatus BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi.

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK18.

- a. **Industri Manufaktur** adalah kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (*maklun*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur** adalah unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur** adalah unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *maklun*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak

membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan dalam survei ini adalah sesuai Perka BPS nomor 19 tahun 2017.

- e. **Indutri Mikro** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya anatar 1-4 orang.
- f. **Industri Kecil** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya anatar 5-19 orang.
- g. **Produksi utama** yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:
 - 1) Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa industri** terbesar;
 - 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
 - 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
 - 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.
- h. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**
 - 1) **Tidak tamat SD** : Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat setingkat Sekolah Dasar.
 - 2) **SD & Sederajat** : Tamat setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
 - 3) **SMP & Sederajat** : Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama.
 - 4) **SMA/Madrasah Aliyah/Paket C**: Tamat dari Sekolah Menengah Atas, baik yang umum, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah.
 - 5) **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** : Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA.
 - 6) **Diploma I/II/III** : Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II atau Diploma III. Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSPL, PGA, PGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari

Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA.

- 7) **Diploma IV/S1** : Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1).
- 8) **S2/S3** : Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.

i. **Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial** adalah tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru, dengan catatan:

- 1) Bila terjadi perubahan KBLI-2 digit, maka tahun beroperasi adalah tahun KBLI tersebut berubah.
- 2) Suatu usaha yang merupakan cabang maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.
- 3) Apabila selama perjalanan usahanya suatu usaha pernah mengalami masa tidak beroperasi/tidak aktif (misal karena renovasi) maka tahun mulai beroperasi adalah tetap tahun yang lama.
- 4) Apabila suatu usaha/perusahaan mengalami perubahan kepemilikan maka tahun mulai beroperasi adalah tahun pemilik pertama menjalankan usahanya.

j. **Tenaga Kerja**

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar** adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar** adalah tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.
- 3) **Tenaga kerja produksi** adalah tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang

langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

4) Tenaga kerja lainnya adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

k. Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah): Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.

1) Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

2) Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

3) Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.

4) Bonus adalah pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

5) Tunjangan adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.

l. Biaya/pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:

1) Bahan Baku adalah komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

2) Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.

- 3) Bahan Bakar** adalah segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
- 4) Pelumas** adalah zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
- 5) Pemakaian Listrik**
Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
- 6) Pemakaian Air**
Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 7) Pemakaian Gas Kota**
Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 8) Alat tulis dan keperluan kantor (ATK)** adalah semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.
- 9) Bunga atas pinjaman** adalah pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2012, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 10) Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi** adalah seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.
- 11) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal** adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 12) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/ konstruksi, dan barang modal lainnya** adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran

untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

- 13) **Sewa tanah untuk usaha** adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.
- 14) **Pajak tak langsung** adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.
- 15) **Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan** adalah semua bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk kayu pengepak. Yang diisikan adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok) yang belum digunakan.
- 16) **Jasa industri yang dikerjakan pihak lain adalah** seluruh pengeluaran atas jasa industri pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan menjahit baju/konveksi yang diborongkan kepada pihak lain, pemotongan balok kayu yang dikerjakan pihak lain, dan lain-lain.
- 17) **Jasa yang dikerjakan pihak lain adalah** seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran kegiatan/usaha. Misalnya pembayaran biaya jasa akuntan/konsultan, biaya untuk asuransi kerugian, biaya promosi/iklan, dll.

Pembayaran jasa lainnya adalah seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya

penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian adalah premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan adalah biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

Lainnya merupakan biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha. Contoh: royalti (merk dagang/hak paten), perijinan, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun (misal: serokan/pengki, ayakan/saringan, pikulan, jarum jahit, *wearpack*, *extra fooding* dan sejenisnya), retribusi, iuran, biaya sertifikasi, dsb.

m. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

n. Harta yang dimiliki

- 1) Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.

- 3) Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
- a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d. Kendaraan
 - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)
- o. Sumber modal :** Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.
Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) Milik sendiri :** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
- 2) Pihak lain :** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK18 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.
 - a. Bank :** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
 - b. Koperasi :** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank :** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
 - d. Modal Ventura :** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
 - e. Keluarga/famili :** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.

- f. **Lainnya** : Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

p. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2018, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan**: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 2) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.
- 3) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 4) **Bimbingan/penyuluhan pemasaran**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan**: Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil 2018 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Perka BPS nomor 19 tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------|
| a. Industri Makanan | KBLI: 10 |
| b. Industri Minuman | KBLI: 11 |
| c. Industri Pengolahan Tembakau | KBLI: 12 |
| d. Industri Tekstil | KBLI: 13 |
| e. Industri Pakaian Jadi | KBLI: 14 |
| f. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | KBLI: 15 |

g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya.	KBLI: 16
h. Industri Kertas dan barang dari Kertas	KBLI: 17
i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI: 18
j. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI: 20
k. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI: 21
l. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI: 22
m. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI: 23
n. Industri Logam Dasar	KBLI: 24
o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 25
p. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	KBLI: 28
q. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI: 30
r. Industri Furnitur	KBLI: 31
s. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI: 32
t. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 33

Ulasan Ringkas

<https://aceh.bps.go.id>

ULASAN RINGKAS

Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor industri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2018 sumbangan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Aceh memang belum memperlihatkan kontribusi yang besar, namun demikian Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor industri pengolahan yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan kegiatan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja

Usaha Industri Mikro dan Kecil merupakan salah satu sektor usaha perekonomian rakyat yang menunjukkan perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Umumnya kegiatan yang diusahakan adalah industri makanan, minuman, industri tekstil (kerajinan sulaman/bordir), industri pakaian jadi, industri kayu dan bahan dari kayu, industri anyaman dari rotan, bambu dan sebagainya. Pada tahun 2018 survei IMK provinsi Aceh mencakup 3.115 sampel usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, persentase usaha industri untuk Aceh hanya sebesar 2,22 persen dari jumlah IMK nasional sebesar 4,46 juta usaha.

Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2018

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja					Jumlah
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	65 073	45 628	3 067	143	131	114 042
%	57.06	40.01	2.69	0.13	0.11	100.00
Indonesia	1 841 598	2 156 739	181 564	59 394	24 752	4 264 047
%	43.19	50.58	4.26	1.39	0.58	100.00

Usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro (IM) sedangkan usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang dikategorikan sebagai Industri Kecil (IK). Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha industri mikro sangat mendominasi survei ini yaitu mencapai 97,07 persen dari jumlah total usaha industri. Sedangkan selebihnya 2,93 persen merupakan usaha industri kecil. Kondisi yang sama juga terjadi secara nasional dimana persentase usaha industri mikro mencapai 93,77 persen, sedangkan usaha industri kecil 6,23 persen.

Sebagian besar tenaga kerja pada usaha Industri Mikro dan Kecil Tahun 2018 dilakukan oleh pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, persentase tenaga kerja tidak dibayar lebih besar dari tenaga kerja dibayar yaitu sebesar 77,49 persen dan selebihnya merupakan pekerja dibayar yaitu sejumlah 22,51 persen dari total tenaga kerja sebanyak 204.312 orang. Begitu juga halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK yang melibatkan pekerja dibayar persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja tidak dibayar. Dimana terdapat sebanyak 34,89 persen pekerja dibayar, sedangkan selebihnya merupakan pemilik atau pekerja keluarga yang tidak dibayar.

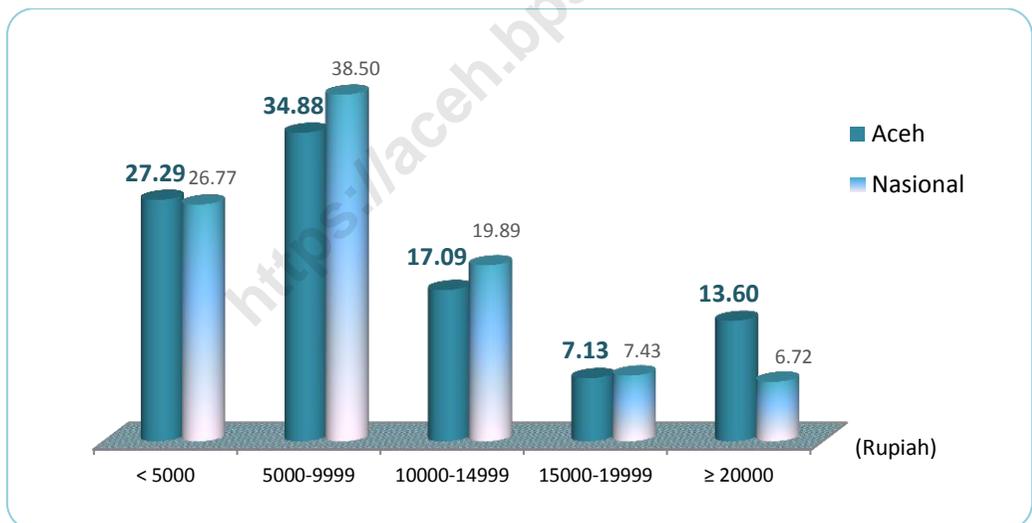
Tabel 2. Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2018

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	114 042	45 988	158 324	204 312
%	2.67	22.51	77.49	100.00
Indonesia	4 264 047	9 291 231	6 143 027	9 434 258
%	100	34.89	65.11	100.00

B. Balas Jasa Pekerja

Secara nasional, penyerapan tenaga kerja IMK di Provinsi Aceh pada tahun 2018 adalah sebanyak 2,17 persen dengan rata-rata balas jasa pekerja 1,41 persen. Jika dilihat dari besarnya balas jasa pekerja memperlihatkan sebaran yang hampir sama antara usaha IMK di Aceh dan secara nasional. Untuk usaha IMK di Aceh persentase tertinggi adalah usaha dengan rata-rata upah pekerja lima hingga kurang dari sepuluh ribu rupiah per jam yang mencapai 34,88 persen. Ini artinya usaha dengan upah dibawah rata-rata masih mendominasi di wilayah Aceh. Begitu pula persentase tertinggi untuk usaha IMK nasional pada nilai upah antara lima ribu hingga kurang dari sepuluh ribu rupiah per jam dengan persentase 39,19 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2018



Jika dilihat dari jumlah hari kerja yang mendominasi adalah usaha dengan jumlah hari kerja maksimum yaitu sebanyak 58,43 persen dengan rata-rata 6 jam kerja per hari. Begitu pula angka nasional sebagian besar usaha IMK berada pada rentang jumlah hari kerja 21-31 hari dengan jam kerja rata-rata 7 jam per hari. Sedangkan usaha IMK dengan jumlah hari kerja 20 hari kebawah sebesar 41,57 persen dengan rata-rata jam kerja sebanyak 6 jam per hari.

Tabel 3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan					
	1-10		11-20		21-31	
	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14.80	6	26.77	6	58.43	6
Indonesia	12.12	6	23.43	6	64.45	7

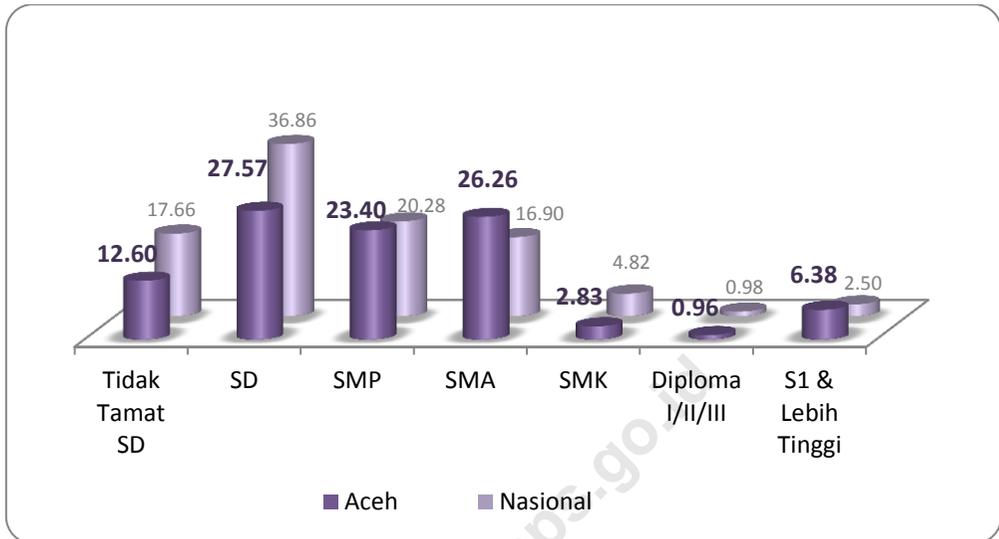
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja

Secara umum berdasarkan hasil survei tahun 2018 jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pengusaha, persentase terbesar adalah tamatan SD. Sebanyak 27,57 persen usaha industri yang pengusahanya hanya lulusan SD dan menyusul persentase kedua terbesar pendidikan SMA sebesar 26,26 persen. Untuk kondisi nasional usaha IMK dengan pendidikan yang ditamatkan pengusaha didominasi oleh tamatan SD dan SMP dengan persentase masing-masing 36,86 persen dan 20,28 persen. Sedangkan tamatan SMA persentasenya sebesar 16,90 persen.

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan pengusaha pada tingkat Sarjana (S1) atau lebih tinggi hanya sebesar 6,81 persen. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,81 persen. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan angka nasional persentasenya juga kecil yaitu 2,50 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa usaha IMK umumnya dijalankan oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sedangkan usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi yang ditamatkan pengusaha hanya sedikit jumlahnya. Hal ini juga memberi sedikit gambaran bahwa pengusaha IMK minim keahlian, dan dapat dikatakan keahliannya dalam berusaha hanya secara turun temurun atau otodidak maupun berasal dari pengalaman.

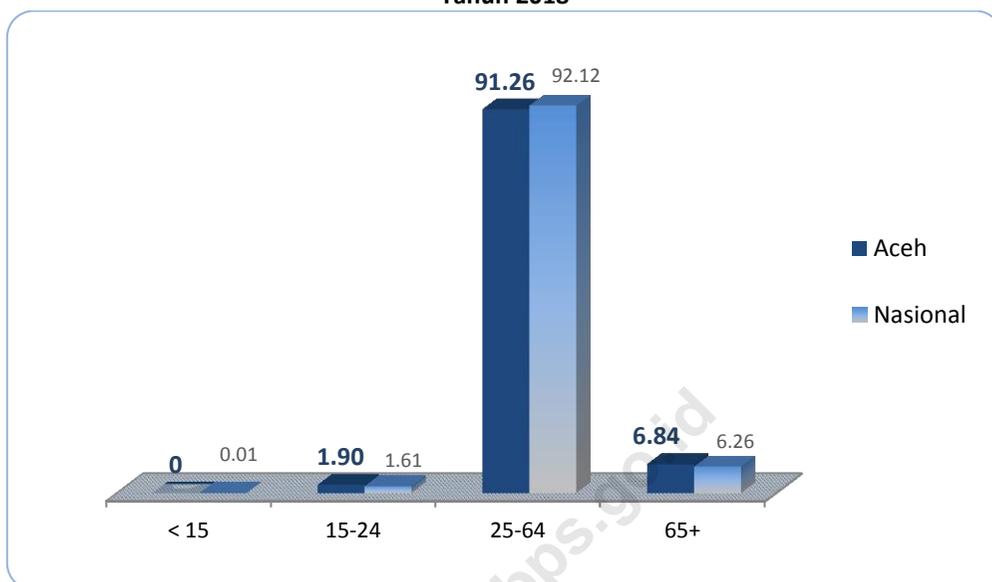
Gambar 2.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2018



Usaha IMK juga didominasi oleh pengusaha dengan kelompok umur produktif yaitu 25-64 tahun. Ini merupakan suatu kewajaran bila pada jenjang usia tersebut mengharuskan seseorang mempunyai penghasilan karena sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Umur 64 tahun dianggap umur maksimal dapat melakukan usaha, karena terkendala banyak hal diantaranya faktor kesehatan, kemampuan dalam mengingat dan sebagainya. Namun demikian masih ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada umur 65 tahun ke atas, meskipun persentasenya cukup kecil.

Berdasarkan kelompok umur pengusaha, sebagian besar usaha mikro kecil pengusahanya berada pada kelompok umur 25-64 tahun yang mencapai 91,26 persen. Persentase terkecil adalah usaha dengan kelompok umur di bawah 25 tahun yaitu 1,90 persen. Adapun secara nasional persentase usaha pada kelompok umur pengusaha 25-64 tahun juga mendominasi yaitu sebesar 92,12 persen. Sedangkan kelompok umur dibawah 25 tahun persentasenya hanya 1,62 persen.

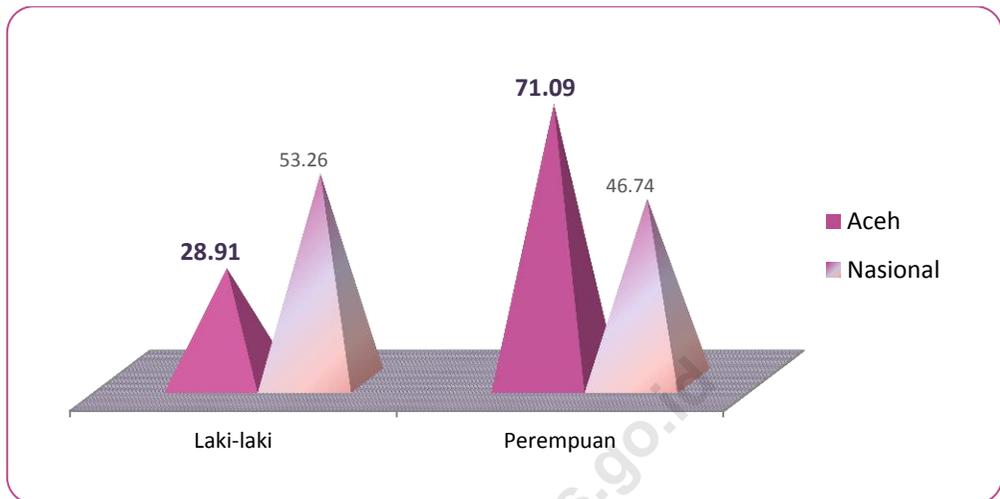
Gambar 3.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2018



Peran *gender* dalam usaha IMK sangatlah berpengaruh. Hal ini terlihat dari persentase tenaga kerja pada usaha IMK Aceh yang lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Persentase tenaga kerja perempuan pada tahun 2018 mencapai 71,09 persen atau lebih dari 145 ribu orang, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang memiliki jumlah persentase 63,09 persen. Sedangkan tenaga kerja laki-laki menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,91 persen dari total 204.312 orang tenaga kerja.

Dibandingkan dengan nasional, komposisi tenaganya berkebalikan dengan Provinsi Aceh dimana persentase laki-laki sedikit lebih besar mencapai 53,26 persen, dan tenaga kerja perempuannya sebesar 46,74 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil bukan hanya menjadi kegiatan usaha utama bagi laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan baik untuk menopang ekonomi rumah tangga ataupun usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan.

Gambar 4.
Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Pada usaha Industri Mikro dan Kecil hampir seluruh tenaga kerja merupakan pekerja produksi, dengan persentase di atas 95 persen. Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan utama adalah kegiatan yang langsung berhubungan dalam proses produksi, seperti pekerja yang secara langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, maupun mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pekerja pendukung perusahaan seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.

Tabel 4. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2018

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	26.47	2.44	68.76	2.33	95.23	4.77	100.00
Indonesia	49.45	3.81	43.38	3.36	92.83	7.17	100.00

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil adalah pekerja tidak dibayar. Terdapat perbedaan komposisi pekerja menurut jenis kelamin terhadap statusnya sebagai pekerja dibayar dan tidak dibayar. Untuk pekerja dibayar, jumlah pekerja laki-laki lebih dominan dari pada pekerja perempuan dengan persentase 11,43 persen pekerja laki-laki dan 11,08 persen pekerja perempuan. Sedangkan pekerja tidak dibayar persentase perempuan lebih besar yaitu 60,01 persen dan pekerja laki-laki 17,49 persen.

Adapun secara nasional persentase tenaga kerja laki-laki sebagai pekerja dibayar adalah 23,74 persen, dan pekerja tidak dibayar 29,52 persen. Sedangkan persentase tenaga kerja perempuan sebagai pekerja dibayar lebih kecil yaitu 11,15 persen dan pekerja tidak dibayar sebesar 35,59 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mendominasi pada usaha IMK khususnya untuk pekerja dengan status dibayar baik di Aceh maupun skala nasional, sedangkan tenaga kerja perempuan lebih cenderung berstatus tidak dibayar atau pekerja keluarga.

Tabel 5. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan status Pekerja Tahun 2018

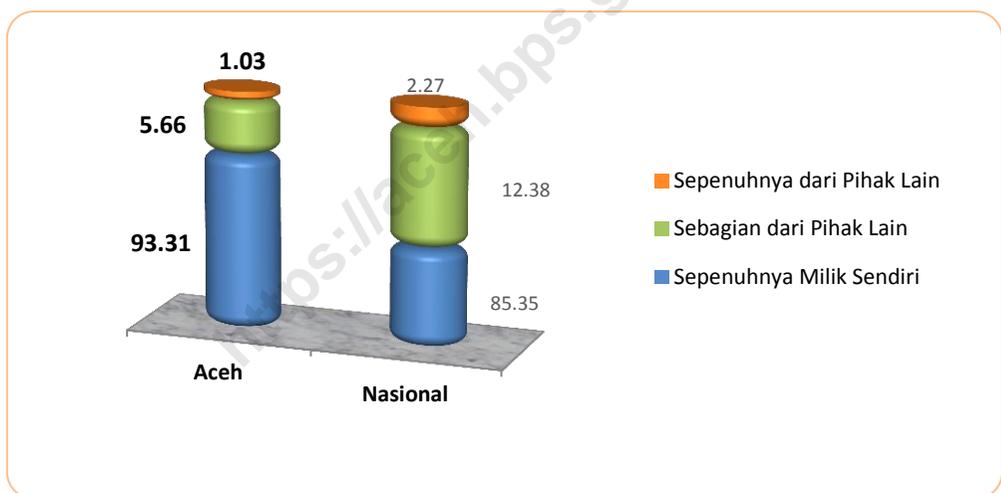
Provinsi	Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Laki-laki	11.42	17.49	28.91
	Perempuan	11.08	60.01	71.09
	Jumlah	22.51	77.49	100.00
Nasional	Laki-laki	23.74	29.52	53.26
	Perempuan	11.15	35.59	46.74
	Jumlah	34.89	65.11	100.00

D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran

Hal penting dalam melakukan kegiatan usaha adalah bagaimana pelaku usaha menyikapi masalah kendala usaha dan menciptakan prospek peluang usaha ke depan. Beberapa variabel yang dikumpulkan dalam survei IMK 2018 antara lain; sumber permodalan, kesulitan utama dalam menjalankan usaha, keikutsertaan dalam koperasi, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil produksi.

Ditinjau dari sumber modal (Gambar 5), terindikasi bahwa usaha IMK sebagian besar sumber modalnya adalah milik sendiri dengan persentase 93,31 persen dan sebagian dari pihak lain sebesar 5,65 persen. Cakupan secara nasional juga memperlihatkan angka cukup tinggi pada persentase usaha dengan sumber modal milik sendiri yaitu 85,35 persen dan 12,38 persen untuk sumber modal sebagian dari pihak lain. Sedangkan yang sepenuhnya berasal dari pihak lain persentasenya cukup kecil, hanya 1,03 persen untuk Aceh dan sebesar 2,27 persen untuk persentase nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah dan lembaga terkait lainnya belum dirasakan maksimal oleh para pengusaha industri mikro dan kecil.

Gambar 5.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal
Tahun 2018



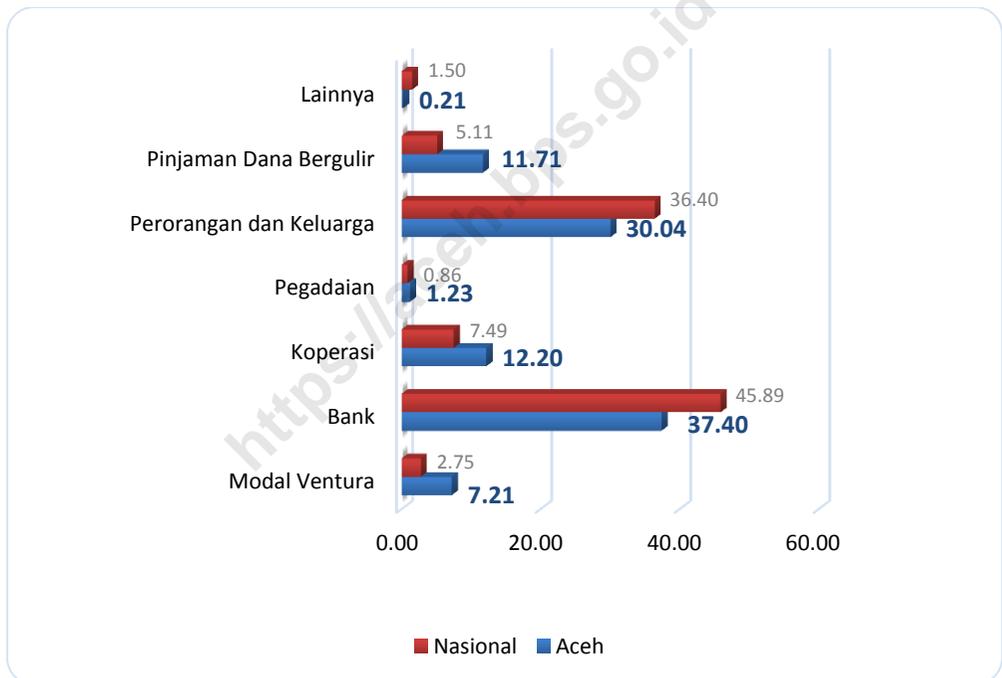
Meskipun banyak usaha IMK yang menggunakan sumber modal milik sendiri, akan tetapi sebagian pengusaha juga tetap melakukan pinjaman modal demi kelancaran dan meningkatkan usahanya. Ada beberapa sumber yang dijadikan tempat peminjaman utama oleh pengusaha untuk permodalannya, antara lain; bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, serta ada yang meminjam kepada perorangan dan keluarga.

Modal usaha imk didominasi oleh modal yang sepenuhnya milik sendiri sedangkan yang yang berasal dari pihak lain hanya sekitar 6,69 persen. Berdasarkan sumber modal utama dari pihak lain, pinjaman bank menjadi urutan teratas dengan

persentase 37,40 persen. Kemudian sumber modal usaha yang persentasenya juga cukup tinggi berasal dari perorangan dan keluarga dengan persentase sebesar 30,04 persen sedangkan lainnya berasal dari pinjaman koperasi, pegadaian, dan lainnya.

Jika kita amati dari persentase di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa saat ini para pengusaha lebih cenderung untuk memilih pinjaman bank dikarenakan sudah banyak bank yang menawarkan suku bunga rendah khususnya untuk usaha mikro kecil seperti kredit usaha rakyat dan sebagainya.

Gambar 6.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama
Tahun 2018

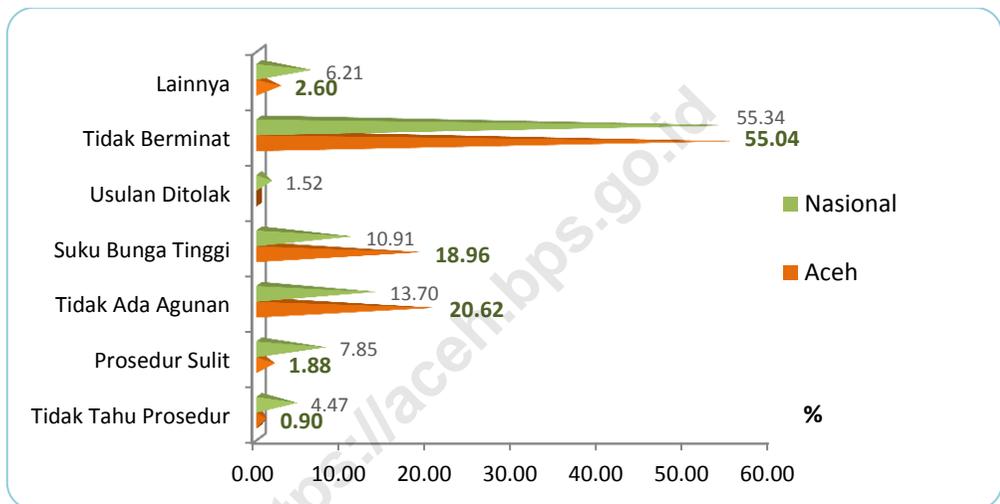


Dari gambar 6 terlihat pula bahwa pengusaha IMK secara nasional lebih banyak memanfaatkan pinjaman bank dengan besaran 45,89 persen. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pinjaman bank tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan modal pinjaman untuk usahanya.

Sementara itu sebagian besar pengusaha yang tidak mengambil pinjaman dari bank dikarenakan alasan tidak berminat dengan persentase 55,04 persen.

Selanjutnya 20,62 persen beralasan tidak ada agunan. Begitu halnya angka nasional juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi untuk pengusaha yang tidak berminat meminjam dari bank yaitu sebanyak 55,34 persen, dan sebesar 13,70 persen memiliki alasan tidak ada agunan.

Gambar 7.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2018



Besaran pinjaman bank oleh pengusaha bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Usaha IMK yang mengambil pinjaman di bawah 20 juta rupiah sebanyak 53,42 persen. Pinjaman dengan kisaran 20 juta hingga 100 juta sebesar 39,21 persen dan sisanya melakukan pinjaman di atas 100 juta rupiah, bahkan sampai dengan nominal 500 juta ke atas walaupun persentasenya hanya 0,95 persen. Untuk nilai agunan rata-rata kurang dari 50 persen sampai dengan di atas 100 persen dari jumlah pinjaman yang diagunkan pengusaha, bahkan tanpa agunan sebesar 26.73 persen usaha.

Dalam survei ini juga ditanyakan kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 75,85 persen usaha mikro dan kecil di Aceh pengusahanya mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan pada skala nasional sebanyak 65,41 persen yang mengalami kesulitan.

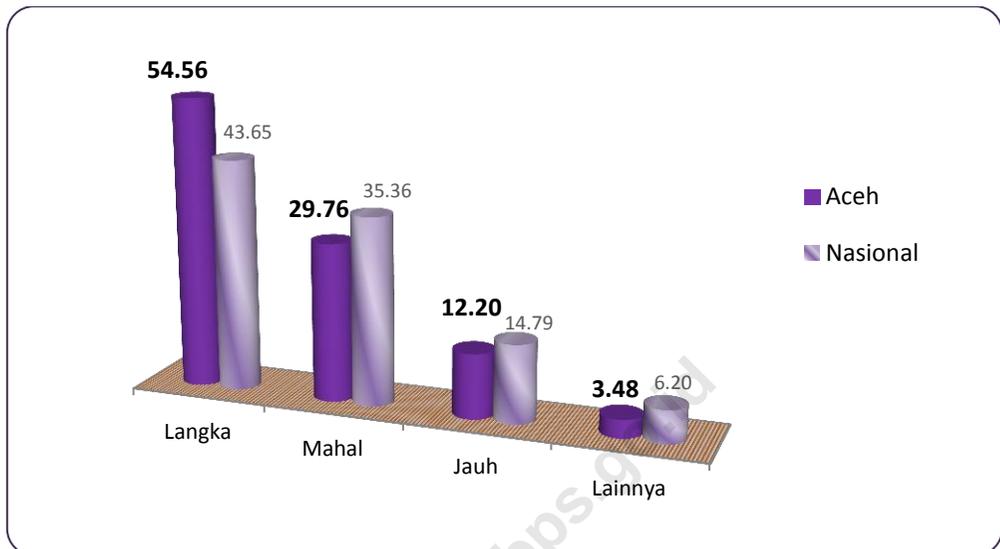
Tabel 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2018

Jenis Kesulitan Utama	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Bahan Baku	13.56	20.70
Permodalan	48.58	29.32
Pemasaran	19.59	21.11
BBM/Energi	5.01	9.08
Transportasi	0.99	2.27
Keterampilan	2.37	5.43
Upah Buruh	3.88	3.77
Lainnya	6.02	8.30
Mengalami Kesulitan	75.85	65.41
Tidak Mengalami Kesulitan	24.15	34.59
Jumlah	100.00	100.00

Kesulitan utama yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha IMK adalah masalah permodalan. Hampir separuh dari total usaha IMK di Aceh yang pengusahanya mengalami kendala dalam hal permodalan. Sebesar 19,59 persen pengusahanya mengalami kesulitan pemasaran dan kesulitan bahan baku dengan persentase 13,56 persen. Sedangkan kesulitan lain seperti masalah BBM/energi, transportasi, keterampilan, upah buruh dan lainnya, persentasenya cukup kecil yaitu kurang dari sepuluh persen. Namun demikian sejumlah 24,15 persen usaha IMK di Aceh tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ditinjau dari skala nasional, masalah permodalan juga menjadi kendala utama dalam kegiatan industri dengan persentase 29,32 persen. Kemudian disusul dengan kendala pemasaran dan bahan baku sebanyak 21,11 persen dan 20,70 persen.

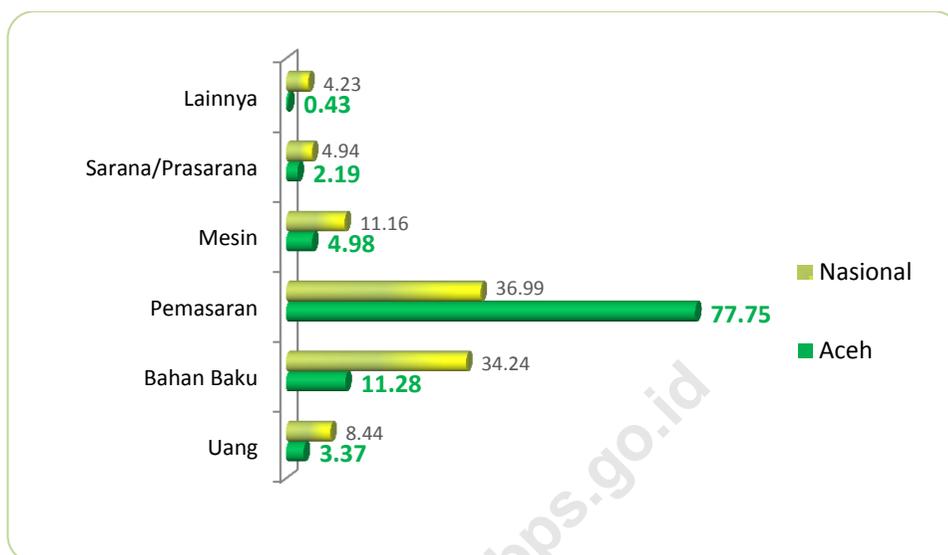
Gambar 8.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama
Bahan Baku Tahun 2018



Secara garis besar sebanyak 13,56 persen usaha IMK di Aceh mengalami kesulitan utama bahan baku dan untuk nasional sebesar 20,70 persen. Kesulitan bahan baku ini terutama dikarenakan oleh kelangkaan bahan baku, artinya ketersediaan bahan baku utama jarang didapat atau bahkan terkadang tidak ada. Hal ini dirasakan oleh 54,56 persen usaha IMK, sedangkan secara nasional sebesar 43,65 persen. Selain itu, kesulitan bahan baku lainnya dikarenakan harga yang mahal (29,76 persen), hal ini dapat menjadi masalah karena dapat berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga akan menjadi masalah baru dalam hal persaingan dengan usaha lainnya.

Kemudian kendala jarak yang jauh (12,20 persen) untuk mendapatkan bahan baku juga menjadi kerumitan tersendiri bagi pengusahanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan transportasi ataupun biaya yang akan dihabiskan untuk mendapatkan bahan baku dengan jarak yang tidak dekat. Dapat diduga sebagian besar pengusaha yang menyatakan kesulitan bahan baku adalah usaha IMK yang memproduksi kerajinan kayu atau bahan-bahan dari kayu, juga usaha industri yang memproduksi kerajinan anyaman dari bambu dan rotan maupun rumbia dan lain sebagainya.

Gambar 9.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain
menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2018



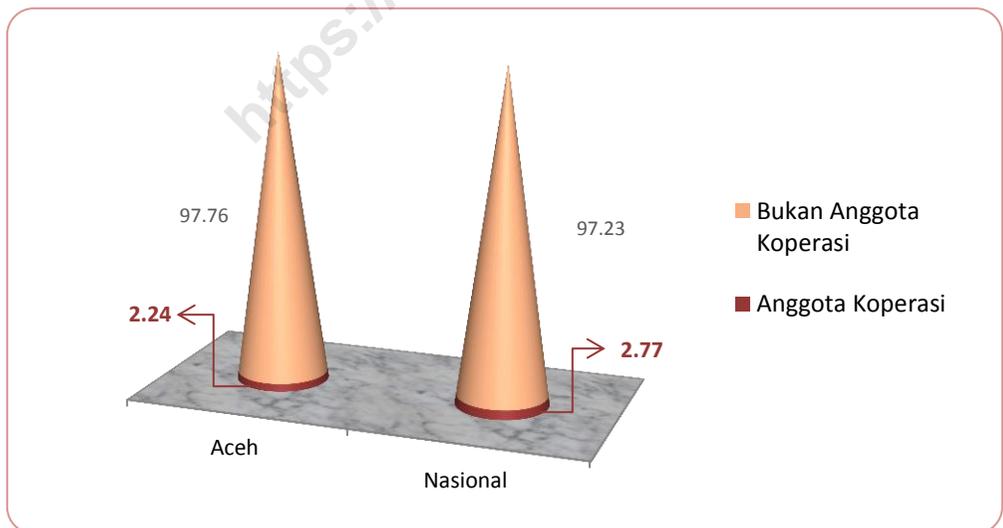
Untuk mengembangkan perusahaan diperlukan kemitraan dengan usaha lain. Kemitraan dapat bekerjasama dalam permodalan, penyediaan bahan baku atau pemasaran. Tahun 2018 persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain cenderung kecil yaitu hanya 5,99 persen. Angka ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian beberapa usaha yang menjalin kemitraan terutama dalam hal pemasaran menduduki peringkat teratas yakni sebesar 77,75 persen, dan pengadaan bahan baku sebesar 11,28 persen. Sedangkan dalam hal pinjaman uang, mesin, sarana/prasarana/peralatan dan lainnya persentasenya kurang dari 5 persen.

Sedangkan kondisi nasional persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain persentasenya yaitu 8,07 persen sedangkan sisanya tidak pernah menjalin kemitraan. Jenis kemitraan yang diterima terutama juga dalam hal pemasaran dan bahan baku. Adapun sebagian usaha yang menjalin kemitraan ini, didukung oleh beberapa lembaga pemerintah, swasta dan lainnya. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2018

Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
BUMN/BUMD	7.78	3.30
Swasta	11.94	32.18
Perbankan	1.80	1.88
LSM	0.06	1.85
Lainnya	78.42	60.80
Menjalinkan Kemitraan	5.99	8.07
Tidak Menjalinkan Kemitraan	94.01	91.93
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 10.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2018



Hal yang sedikit memprihatinkan bahwa para pengusaha IMK hampir tidak tersentuh oleh koperasi. Padahal koperasi merupakan suatu wadah yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal dan lainnya. Karena bagaimanapun koperasi dapat diandalkan

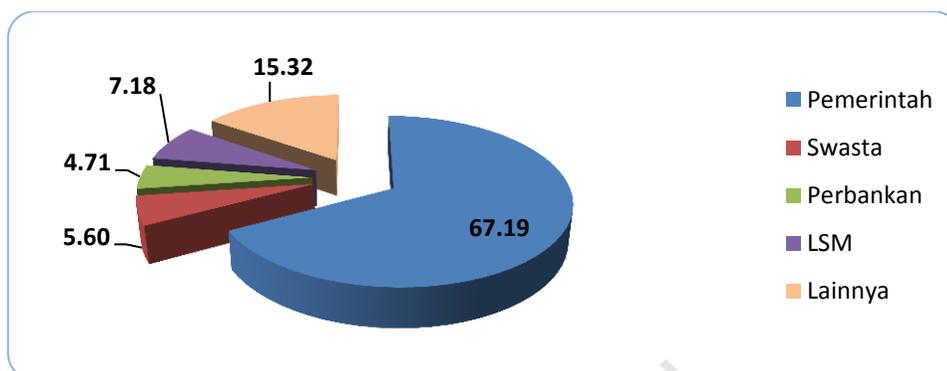
sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, akan tetapi belum mampu merangkul para pengusaha IMK untuk memanfaatkan jasa koperasi dalam menjalankan usahanya. Hanya sekitar 2,24 persen usaha di Aceh yang tergabung sebagai anggota koperasi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase ini semakin menurun. Secara nasional keanggotaan koperasi persentasenya sekitar 2,77 persen.

Di samping itu, persentase usaha IMK yang menerima pelayanan dari koperasi hanya sedikit saja yaitu sekitar 3,28 persen. Begitupun angka nasional juga masih rendah yaitu sekitar 2,77 persen. Sedangkan lebih dari 95 persen usaha tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan. Adapun usaha mikro kecil yang menerima pelayanan/bantuan dari badan maupun lembaga baik pemerintah, koperasi, swasta, LSM dan lainnya dapat berupa bantuan uang, barang modal, pengadaan bahan baku, pelayanan pemasaran, mesin dan lainnya.

Tabel 8. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima dari Koperasi Setahun yang Lalu Tahun 2018

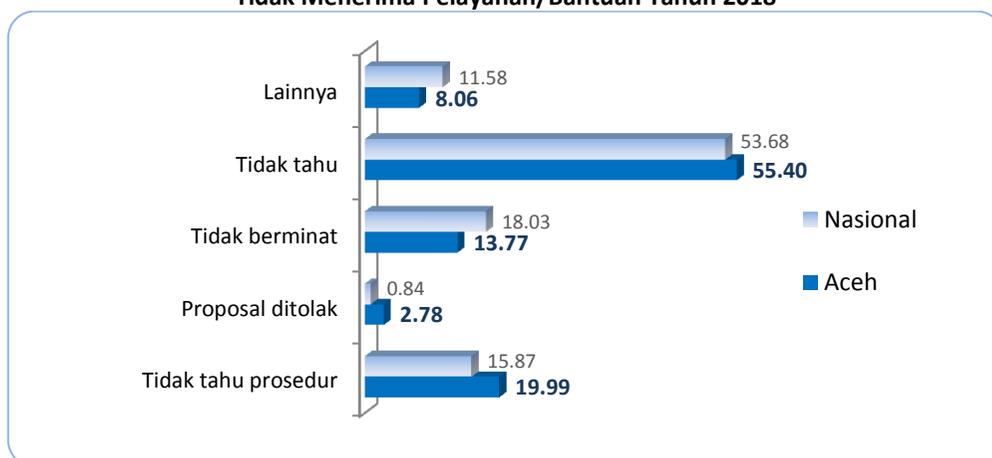
Pelayanan yang Diterima	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Uang	36.84	51.63
Bahan Baku	12.56	13.94
Pemasaran	0.08	9.44
Mesin	13.90	5.87
Barang Modal	34.23	8.75
Lainnya	2.40	10.37
Menerima Pelayanan	3.28	3.60
Tidak Menerima Pelayanan	96.72	96.40
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 11.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan
menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2018



Banyak program bantuan yang telah digulirkan pemerintah untuk meningkatkan usaha industri mikro dan kecil di daerah. Namun bantuan tersebut hanya sedikit sekali yang dirasakan oleh para pengusaha. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya karena tidak tahu prosedur, proposal ditolak, tidak berminat, bahkan ada yang tidak tahu. Lebih dari 50 persen usaha IMK Aceh yang pengusahanya mengaku tidak tahu akan pelayanan/bantuan baik dari pemerintah, koperasi maupun lembaga lainnya. Selain itu relatif kecilnya usaha IMK yang menerima bantuan, dapat juga disebabkan dana yang dialokasikan pada bantuan pengembangan usaha industri mikro kecil masih terbatas. Sehingga ketidaktahuan pengusaha akan prosedur pelayanan serta proposal yang ditolak juga menjadi salah satu hambatan tidak diperolehnya bantuan.

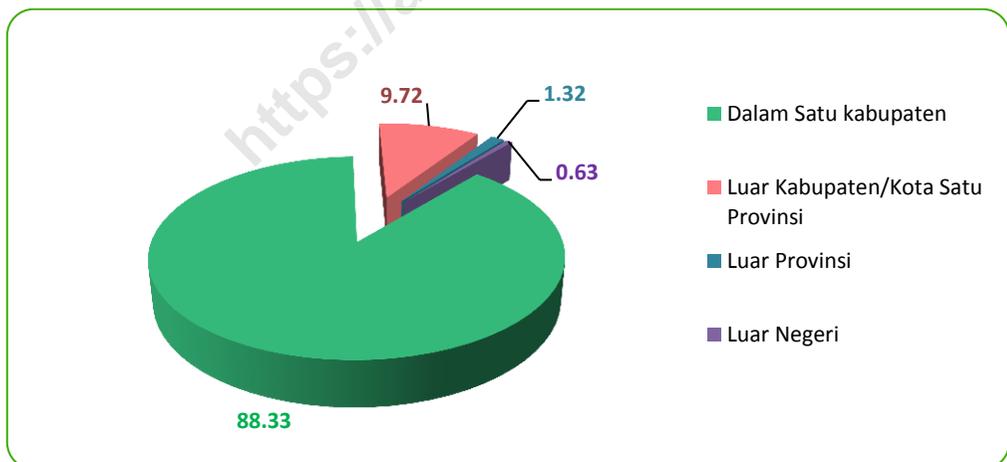
Gambar 12.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama
Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2018



Salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan suatu usaha industri adalah menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Pemilihan lokasi pemasaran yang kurang tepat akan menghambat kelancaran usaha industri itu sendiri. Dengan jalinan kemitraan yang cukup terbatas, maka ruang lingkup pemasaran hasil produksi cenderung sempit. Untuk wilayah Aceh, lokasi pemasaran yang menjadi sasaran terbanyak adalah dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 88,33 persen, kemudian luar kabupaten/kota satu provinsi sebanyak 9,72 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri dengan persentase masing-masing 1,31 persen dan 0,63 persen.

Begitu pula halnya dengan kondisi nasional, pemasaran hasil produksi lebih banyak dipasarkan dalam satu kabupaten/kota dengan persentase 81,96 persen. Sebanyak 13,94 persen dipasarkan di luar kabupaten/kota satu provinsi dan luar provinsi hanya 3,78 persen saja. Sedangkan untuk pemasaran diluar negeri rata-rata hanya dibawah satu persen dari seluruh total produksi.

Gambar 13.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran
di Provinsi Aceh Tahun 2018



Lampiran Tabel

<https://aceh.bps.go.id>

Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 1 *Number of Micro and Small Scale Establishment by Group of Workers in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Kelompok Tenaga Kerja Group of Workers					Jumlah Total
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	65 073	45 628	3 067	143	131	114 042
Indonesia	1 841 598	2 156 739	181 564	59 394	24 752	4 264 047

Tabel 2 Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 2 *Number of Establishment, Workers, Revenue, Expenditure, and Compensation of Workers of Micro and Small Scale Establishment in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Banyak- nya Usaha Number of Establish- ment	Tenaga Kerja (%) Workers			Pendapat- an Revenue	Pengeluar- an Expenditure	Balas Jasa Pekerja Compensati- on of Workers
		Dibayar Paid	Tidak Dibayar Unpaid	Jumla- h Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	114 042	22.51	77.49	100.00	8 808 239 538	4 521 571 408	740 843 604
Indonesia	4 264 047	34.89	65.11	100.00	520 644 442 256	262 456 940 030	52 401 852 582

Tabel 3 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 3 *Number of Micro and Small Scale Establishment and Average of Working Hour a Day by Working Day a Month in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan / Working Day a Month						Jumlah / Total	
	1- 10		11- 20		21- 31			
	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16 876	6	30 526	6	66 640	6	114 042	6
Indonesia	516 644	6	999 075	6	2 748 328	7	4 264 047	7

Tabel 4 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 4 *Number of Micro and Small Scale Establishment by Level of Educational Attainment of Entrepreneurs in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Level of Educational of Entrepreneurs							Jumlah Total
	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD Elementary School	SLTP Junior High School	SLTA Senior High School	Diploma I/II Diploma I/II	Sarjana Muda/ Diploma III Diploma III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi University Degree	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	14 368	31 444	26 684	29 946	3 228	1 090	7 282	114 042
Indonesia	752 855	1 571 597	864 909	720 794	205 355	41 798	106 739	4 264 047

Tabel 5 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 5 Number of Micro and Small Scale Establishment by Age Group of Entrepreneurs in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Kelompok Umur Pengusaha Age Group of Entrepreneurs				Jumlah Total
	< 15	15 - 24	25 - 64	65 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Aceh	-	2 170	104 078	7 794	114 042
Indonesia	571	68 780	3 927 973	266 723	4 264 047

Tabel 6 Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 6 Number of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Sex and Kind of Workers in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Jumlah / Total		
	Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker		
	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	54 086	4 984	59 070	140 490	4 752	145 242	194 576	9 736	204 312
Indonesia	4 665 625	359 185	5 024 810	4 092 119	317 329	4 409 448	8 757 744	676 514	9 434 258

Tabel 7 Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 7 *Number of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Workers Status and Sex in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Pekerja Dibayar / Paid Worker			Pekerja Tidak Dibayar / Unpaid Worker			Jumlah / Total		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	23 343	22 645	45 988	35 727	122 597	158 324	59 070	145 242	204 312
Indonesia	2 239 463	1 051 768	3 291 231	2 785 347	3 357 680	6 143 027	5 024 810	4 409 448	9 434 258

Tabel 8 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 8 *Number of Micro and Small Scale Establishments by Compensation of Paid Worker per Hour in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar Number of Establishment with Paid Worker	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Jam dalam Kelompok Rupiah (%) Compensation of Worker per Month in Group Thousand Rupiahs				
			< 5000	5000-9999	10000-14999	15000-19999	1.000-4.999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
Aceh	114 042	18 891	5 156	6 589	3 229	1 347	2 570
Indonesia	4 264 047	1 097 970	293 929	430 251	218 388	81 594	73 808

Tabel **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2018**

Table **9** **Number of Micro and Small Scale Establishments by Revenue Value on a Year in Aceh Province 2018**

Provinsi Province	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah) Revenue Value on a Year (Millions Rupiahs)									Jumlah Total
	< 5	5 - 9	10-24	25-49	50-99	100-199	200-249	300-449	500-999	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Aceh	8 468	11 510	31 344	26 549	19 065	8 039	3 932	3 109	2 026	114 042
Indonesia	430 271	541 674	977 265	729 461	625 605	431 865	177 900	155 797	194 209	4 264 047

Tabel **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2018**

Table **10** **Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Capital in Aceh Province 2018**

Provinsi Province	Sumber Modal Source of Capital			Jumlah Total
	Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebahagian dari Pihak Lain Partially from Others	Sepenuhnya dari Pihak Lain Fully from Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	106 418	6 449	1 175	114 042
Indonesia	3 639 201	528 029	96 817	4 264 047

Tabel 11 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 11 Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Main Loan in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Sumber Modal Source of Capital		Sumber Modal Utama The Main Source of Capital						
		Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebagian atau Sepenuhnya Pihak Lain Others	Modal Ventura Ventura Capital	Koperasi Coopera- tive	Bank Bank	Pegadaian Pawnshop	Perorang- an & Keluarga Individual & Family	Pinjaman Dana Bergulir Revolving Fund Loans	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	114 042	106 418	7 624	550	2 851	930	94	2 290	893	16
Indonesia	4 264 047	3 639 201	624 846	17 205	286 720	46 832	5 380	227 412	31 915	9 382

Tabel 12 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 12 Number of Micro and Small Scale Establishments by Main Reason for Not Having Bank Loan in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Banyaknya Usaha yang Memanfaat- kan Pnjaman Number of Establishment Having Loans	Meminjam dari Bank Having Bank Loans	Tidak Meminjam dari Bank Not Having Bank Loans	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Main Reason for Not Having Bank Loan						
				Tidak Tahu Prosedur Not Knowing Procedur	Prosedur Sulit Difficulty in Procedur	Tidak Ada Agunan Not Having Collateral	Suku Bunga Tinggi Interest Rate	Usulan Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	7 624	2 851	4 773	43	90	984	905	-	2 627	124
Indonesia	624 846	290 021	334 825	14 966	26 289	45 861	36 540	5 071	185 304	20 794

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 13 *Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulties in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties	Jenis Kesulitan Types of Difficulties							
				Bahan Baku Raw Materials	Pemasaran Marketing	Modal Capital	BBM/ Energi Fuel/ Energy	Transp ortasi Transp or tation	Keteram pilan Skill	Upah Buruh Wage	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	114 042	27 539	86 503	13 143	47 102	18 997	4 854	964	2 294	3 759	5 838
Indonesia	4 264 047	1 474 968	2 789 079	738 327	1 045 746	752 976	323 985	80 981	193 816	134 605	295 958

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 14 *Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulty of Raw Material in Aceh Province 2018*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Types of Main Difficulty of Raw Material			
			Selain Bahan Baku Except Raw Material	Bahan Baku Raw Material	Langka Scarcity	Mahal Expensive	Jauh Distant	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	114 042	27 539	73 360	13 143	7 171	3 911	1 604	457
Indonesia	4 264 047	1 474 968	2 050 752	738 327	322 269	261 095	107 177	45 786

Tabel 15 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2018**

Table 15 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Membership of Cooperative and Kind Services Received in Aceh Province 2018**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Bukan Anggota Koperasi Non Member of Cooperative	Anggota Koperasi Member of Cooperative	Tidak Menerima Pelayanan Not Received Service	Menerima Pelayanan Received Service	Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Types of Services Received a Year Ago					
						Uang Money	Bahan Baku Raw Materials	Pemasaran Marketing	Mesin Machinery	Barang Modal Capital Asset	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
Aceh	114 042	111 484	2 558	96.72	3.28	36.84	12.56	0.08	13.90	34.23	2.40
Indonesia	4 264 047	4 145 940	118 107	96.40	3.60	51.63	13.94	9.44	5.87	8.75	10.37

Tabel 16 **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2018**

Table 16 **Number of Micro and Small Scale Establishments by Organizer of Business Partnership in Aceh Province 2018**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalin Kemitraan Not Having Partnership	Menjalin Kemitraan Having Partnership	Badan/lembaga yang Menjalin Kemitraan Organizer of Business Partnership				
				BUMN/BUMD Government	Swasta Private	Perbankan Bank	LSM NGO	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	114 042	107 209	6 833	535	821	124	4	5 392
Indonesia	4 264 047	3 919 760	344 287	11 476	111 953	6 526	6 426	211 507

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 17 Number of Micro and Small Scale Establishments with Workers Receiving Business Advisory by Kind of Business Advisory in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalinkan Kemitraan Not Having Partnership	Menjalinkan Kemitraan Having Partnership	Jenis Kemitraan yang Diterima Kind of Partnership Received					
				Uang Money	Bahan Baku Raw Materials	Pemasaran Marketing	Mesin Machine	Barang Modal Capital Goods	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Aceh	114 042	107 209	6 833	243	813	5 605	359	158	31
Indonesia	4 264 047	3 919 760	344 287	34 452	139 840	151 086	45 590	20 194	17 255

Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2018

Table 18 Number of Micro and Small Scale Establishments Receiving Business Advisory by Organizer of Business Advisory in Aceh Province 2018

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Organizer of Business Advisory				
		Pemerintah Government	Swasta Private	Perbankan Bank	LSM NGO	Lainnya Others
(1)	(2)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	114 042	3 754	313	263	401	856
Indonesia	4 264 047	116 833	33 411	66 474	9 901	16 599

Tabel 19 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 19 Number of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receiving Assistanship in Aceh Province 2018

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan <i>Reason for Not Receiving Assistanship</i>				
		Tidak Tahu Prosedur <i>Not Knowing the Procedur</i>	Proposal Ditolak <i>Proposal Rejected</i>	Tidak Berminat <i>Not Interested</i>	Tidak Tahu <i>Not Knowing</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	114 042	22 048	3 072	15 184	61 103	8 895
Indonesia	4 264 047	652 186	34 580	741 351	2 206 534	476 082

Tabel 20 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2018
Table 20 Number of Micro and Small Scale Establishments by Location of Marketing and Export in Aceh Province 2018

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Lokasi Pemasaran <i>Marketing Area</i>				Pemasaran ke Luar Negeri <i>Export</i>			
		Dalam Satu Kabupaten/ Kota <i>In The District</i>	Luar kabupaten/ Kota Satu Provinsi <i>Outside The District</i>	Luar Provinsi <i>Outside The Province</i>	Luar Negeri <i>Foreign</i>	1 - 24 %	25%- 49%	50% - 79 %	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Aceh	114 042	113 014	12 440	1 680	809	801	8	-	
Indonesia	4 264 047	4 032 899	686 134	186 219	15 299	4 946	645	3 736	5 972

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp : (0651) 23005 Faks : (0651) 33632

E-mail : bps1100@bps.go.id

Homepage : <http://www.aceh.bps.go.id>